



Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal

SITI ARININGSIH^{1*}

¹ ASN Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

*Correspondence: ariningsih@gmail.com

Accepted Date: 31 Januari, 2024

ABSTRACT

The national goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia which have been initiated by the founders of the country as stated in the Preamble of the 1945 Constitution in the fourth paragraph are: 1) to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood spilled 2). Promote general welfare 3). educating the nation's life and 4). Participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice. To achieve this goal, especially the government's obligation to serve the poor, the government regulates in Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare. In particular, Articles 19 and 20 specifically discuss poverty. Poverty is very important and requires serious attention by the government, poverty alleviation programs are a priority program in development. The success and effectiveness of poverty alleviation programs is highly dependent on the policies set by the central government and regional governments and involves many government institutions in its implementation.

KEYWORDS: poverty alleviation; poverty alleviation programs; social welfare

ABSTRAK

Tujuan nasional NKRI yang telah digagas oleh pendiri negara seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang 1945 alinea ke empat yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2). Memajukan kesejahteraan umum 3). Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut khususnya wujud kewajiban pemerintah dalam melayani warga masyarakat yang miskin, pemerintah mengatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Khususnya Pasal 19 dan 20 khusus membahas kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian yang serius oleh pemerintah, program pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas dalam pembangunan, Keberhasilan dan efektivitas program pengentasan kemiskinan sangat tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan melibatkan banyak sekali institusi pemerintah dalam pelaksanaannya.

KATAKUNCI: kesejahteraan sosial; pengentasan kemiskinan; program pengentasan kemiskinan

1. Pendahuluan

Kesejahteraan dan keadilan merupakan cita cita luhur bangsa Indonesia, oleh karenanya kehadiran negara untuk mewujudkan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat merupakan hal yang sangat penting (Dewanta, 2000). Kebijakan pemerintah

Cite This Article:

Ariningsih, S. (2024). Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Economic Military and Geographically Business Review, 1(2), 62-68. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i2.2024.613>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



khususnya pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program pembangunan (Bappenas, 2004). Indonesia merupakan negara berkembang di mana penduduknya banyak yang masih di bawah garis kemiskinan, sehingga negara harus menjadikan program pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas (Dewanta, 2000).

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, progresif, adil, dan sejahtera dengan mempercepat pembangunan di semua sektor. Pembangunan akan bertumpu pada keunggulan kompetitif di berbagai lokasi, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan melalui pemanfaatan kearifan lokal dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta pemulihan ekonomi nasional (Bappenas, 2004).

Untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, salah satu teknik yang efektif adalah dengan memodernisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di tingkat pemerintah daerah, mulai dari kabupaten atau kota hingga ke tingkat desa. Strategi penting untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan akses terhadap modal, memperluas produk dan pemasaran, meningkatkan keterampilan dan layanan bisnis, menumbuhkan wirausaha, membentuk kemitraan, dan mempromosikan pemberdayaan (Dewanta, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini terdiri dari bagaimana permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan bagaimana program tersebut berjalan sesuai program di Kabupaten Kendal.

2. Metode

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan memanfaatkan data baik primer maupun sekunder, penelitian lapangan dipilih untuk melihat realitas kondisi ekonomi dan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Kendal dan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pengentasan kemiskinan..

3. Hasil dan Diskusi

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kelangkaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan air bersih (Dewanta, 2000). Hal ini terkait erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan dapat mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, yang penting untuk mengatasi kemiskinan dan memperoleh pengakuan yang layak Anda dapatkan sebagai anggota masyarakat (Dewanta, 2000). Kemiskinan adalah kondisi di mana kekurangan hal-hal yang biasanya dimiliki, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, berdampak langsung pada kualitas hidup (Bappenas, 2004). Kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang dapat mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan pengakuan yang layak sebagai warga negara (Bappenas, 2004).

Kemiskinan merupakan masalah global, Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif sementara yang lainnya memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan Istilah “Negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara yang miskin (Dewanta, 2000). Kemiskinan merupakan persoalan bangsa yang mendesak dan bersifat multidimensional dan merupakan problematik yang harus segera di tangani (Bappenas, 2004). Kemiskinan yang bersifat multidimensional menuntut penanggulangan yang sistematis dan komprehensif, sehingga perlu melibatkan beberapa Lembaga, instansi, swasta pada level pemerintahan pusat sampai ke daerah (Dewanta, 2000).

Khususnya di Kabupaten Kendal untuk menindak lanjuti Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang mengamanatkan kolaborasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga khususnya di Kabupaten Kendal terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Yang di ketuai oleh Wakil Bupati Kendal. TKPK Kabupaten Kendal memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, mengendalikn pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Kendal berkedudukan di Badan Perencanaan dan Penelitian pembangunan (BAPERLITBANG).

Tabel 1. Data Series Subjek Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten Kendal

Indikator Kemiskinan	Data Kemiskinan		
	2018	2019	2020
Jumlah penduduk miskin	94,70	91,20	97,50
Persentase Penduduk Miskin	9,84	9,41	9,99
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,85	1,47	1,37
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,47	0,32	0,25
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	35.3127,00	369.769,00	396.691

Mengukur ide kemiskinan BPS menggunakan metode kebutuhan dasar untuk menilai kemampuan memenuhi kebutuhan mendasar (Basic needs approach. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-makanan, jika dilihat dari perspektif pengeluaran. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulanannya berada di bawah garis kemiskinan (Bappenas, 2004).

Sedangkan Konsep Garis Kemiskinan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimal untuk perumahan, sandang, Pendidikan, Kesehatan, Paket komoditi kebutuhan dasar dan makanan di wakili oleh jenis komoditi (Bappenas, 2004).

Sesuai data BPS pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 di Kabupaten Kendal penduduk miskin turun sebesar 3,5 % tetapi pada rentang waktu Tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 6,3 %, hal tersebut disebabkan karena dampak terjadinya pandemik COVID 19. Hal ini juga berlaku menyeluruh di seluruh dunia karena bersifat global, angka kemiskinan dunia yang semula 9,2 % pada September 2019 meningkat 9,7 % pada akhir 2020, hal ini berarti kurang lebih 3,3 juta rang yang jatuh miskin. Dalam pengentasan kemiskinan hal yang paling utama yaitu adanya data yang valid dari penduduk miskin karena selama ini bukan rahasia umum bahwa data apa pun di Indonesia sering kali terjadi kesimpangsiuran soal kebenarannya, sehingga untuk pengentasan kemiskinan perlu adanya data tunggal dalam pengentasan kemiskinan. Di Kabupaten Kendal untuk menyajikan data yang valid di laksanakan evaluasi pendataan dan pemetaan warga miskin melalui Basis Data Terpadu (BDT) atau data BPS yang tepat dan akurat.

Pendataan ini dilakukan untuk memperoleh data masyarakat miskin yang lebih b, sehingga akan baik, valid dan benar serta tepat sasaran karena sangat penting sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah termasuk upaya dalam pengentasan kemiskinan, sehingga nantinya mampu memperlihatkan di mana dan siapa yang dimaksud warga miskin dan akan terlihat jelas siapa yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan banyak dilaksanakan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada warga miskin, walaupun hal ini banyak

menimbulkan polemik di masyarakat seperti kecemburuan antar warga yang tidak menerima bantuan, pola pikir warga yang mengaku miskin supaya di berikan bantuan.

Sejak tahun 2007, pemerintah telah memulai program PKH yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai penerima manfaat PKH. PKH memberikan dukungan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu, khususnya ibu hamil dan anak, sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan layanan pendidikan (Fasdik) di sekitarnya. Manfaat PKH diperluas untuk mencakup individu penyandang disabilitas dan lansia di bawah program PKH. Masyarakat berpenghasilan rendah didesak untuk memanfaatkan program perlindungan dan bantuan, serta program perlindungan sosial lainnya, yang bersifat pelengkap dan berkelanjutan (Mardikanto & Soebianto, 2012).

Pemerintah diharapkan dan berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) dan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bantuan Pangan Tunai (BPNT) di Kabupaten Kendal sebanyak 72.662 Keluarga Penerima Manfaat, BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerja sama dengan bank, Bahan makanan yang disediakan berupa beras, telur, buah. BPNT merupakan stimulasi kepada keluarga miskin untuk pemenuhan gizi dan diharapkan bisa meningkatkan derajat Kesehatan warga miskin (Mardikanto & Soebianto, 2012).

Program lain untuk pengentasan kemiskinan yaitu program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kendal melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada warga miskin berupa bahan bangunan senilai Rp. 17.500.000,- dan sisanya Rp. 2.500.000,- untuk upah tukang karena merupakan bantuan stimulus untuk warga miskin harus mengeluarkan swadaya baik berupa tenaga, uang dan bahan lainnya. Untuk program bidang Kesehatan masyarakat, pemerintah melaksanakan program JKN KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat) yang merupakan sebuah program jaminan sosial yang berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Peraturan ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan layak dan meningkatkan martabatnya. terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur memberikan jaminan sosial yang menyeluruh dan mengembangkan sistem jaminan sosial nasional di bidang Kesehatan (Mardikanto & Soebianto, 2012).

Di Kabupaten Kendal selain warga masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu dan fakir miskin yang di tanggung iurannya oleh pemerintah pusat pemerintah Kabupaten Kendal memfasilitasi pembayaran ke pesertaaan BPJS kepada warga yang membutuhkan dan memenuhi ketentuan. Selain itu, pemerintah memerlukan kerja sama dengan berbagai lembaga perbankan untuk memfasilitasi masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu program pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemerintah terhadap pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberikan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR ini bertujuan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pendanaan disalurkan melalui dana perbankan. Dengan program Kur ini diharapkan UMKM di Indonesia semakin mampu berkembang, mandiri, dan berdaya saing. Diharapkan akan muncul UMKM baru yang dapat mengembangkan dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Program pengentasan kemiskinan tersebut di atas merupakan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan warganya secara keseluruhan program yang ada sudah mencakup beberapa kebutuhan dasar manusia, baik dari kebutuhan sosial, pangan, papan. Metode pemberian bantuan sebagai upaya pengentasan kemiskinan semestinya harus dibarengi dengan pemberdayaan kepada masyarakat agar tidak bergantung dengan

bantuan sosial, warga miskin harus membuka diri untuk mengembangkan kemampuan dirinya untuk keluar dari kemiskinan. Dalam pembangunan, empat elemen penting harus diprioritaskan: pemberdayaan masyarakat (people empowerment), partisipasi masyarakat (people participation), organisasi masyarakat (Community organization) dan pemimpin yang bijaksana (Leadership).

Di tahun 2022, berbagai variabel dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan. Pada awalnya, migrasi manusia dan produk akan lebih efisien pada tahap awal epidemi. Kedua, penetapan harga suatu barang pada umumnya diatur, khususnya untuk bahan pangan, karena harga pangan berdampak signifikan terhadap pola pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, banyak program bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat miskin selama pandemi didanai oleh Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Agar upaya pengentasan kemiskinan berhasil, perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat. Pembangunan harus didorong dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga memerlukan partisipasi seluruh anggota dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasilnya. Pembangunan merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan seluruh warga negaranya, bukan tugas yang semata-mata dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat³.

Inisiatif pengentasan kemiskinan mungkin melibatkan kegiatan pemberdayaan kelompok yang sangat miskin, seperti kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok pangan dan kesehatan. Kelompok masyarakat ini memerlukan program pelayanan yang dapat meningkatkan keterampilannya. Dengan sangat kompleksnya masalah dan faktor penyebab kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan tidak bisa dipecahkan dari aspek ekonomi saja, Menurut Anwar (2005), pengentasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukkan variabel non ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengentasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia.

Dalam keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat⁴. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom up, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Anwar (2005), pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: Penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan, dan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tentukan oleh ketepatan data dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan data valid/data tunggal kemiskinan sehingga dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan sesuai dengan data yang benar dan memperoleh keputusan yang tepat.
2. Perlu adanya regulasi khususnya Peraturan Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan karena dalam pengentasan kemiskinan diperlukan Langkah-langkah yang luar biasa dan memerlukan sinergitas dari beberapa stakeholder baik dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat
3. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dukungan dana yang tidak sedikit dan memerlukan keseriusan pemerintah dan di implementasikan dalam kegiatan pada Lembaga, instansi dan di realisasikan dalam APBN maupun APBD Kabupaten Kendal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah mendukung penulisan penelitian ini

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel penelitian ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

Open Access

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- Bappenas. (2004). *Rencana Strategik Penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta. <https://www.bappenas.go.id/files/afe462bd-0ba4-4f18-8904-284217d1b990/download>
- Dewanta, AS. (2000). *Kemiskinan Kesenjangan di Indonesia*. Jogjakarta: Aditya Media, 95. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=81582>
- Mardikanto dan Soebianto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/product/pemberdayaan-masyarakat-dalam-perspektif-kebijakan-publik/>
- Anwar, M. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Alfabeta: Bandung, 85.

Biografi Penulis

SITI ARININGSIH, ASN Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

- Email: ariningsih@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -